

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data kuesioner dari 30 responden dan wawancara mendalam di 5 nagari terpilih di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kualitas governance pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Tanjung Raya berada pada kategori sangat tinggi dengan nilai rata-rata 4,72 pada skala Likert 1–5. Implementasi prinsip tata kelola keuangan desa yang mencakup dimensi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah berjalan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
2. Dimensi pertanggungjawaban mencatat nilai tertinggi (4,90), mencerminkan tingginya komitmen pemerintah nagari dalam mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) bahwa mekanisme pertanggungjawaban yang kuat dapat meminimalisir agency problem antara prinsipal dan agen.
3. Dimensi ketepatan waktu pelaporan mencatat nilai terendah (4,03), mengindikasikan bahwa transparansi publik kepada masyarakat khususnya aksesibilitas informasi realisasi keuangan belum terwujud secara optimal, mencerminkan masih berlangsungnya asimetri informasi sebagaimana diteorikan oleh Eisenhardt (1989) dan Fama & Jensen (1983).
4. Peran aktif Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) sebagai lembaga pengawasan internal terbukti menjadi faktor determinan dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan nagari. Fungsi checks and balances yang dijalankan BPN memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dari dalam struktur pemerintahan desa itu sendiri.

1.2 Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan konfirmasi empiris terhadap relevansi teori keagenan dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. Hubungan antara masyarakat selaku prinsipal dan aparat desa selaku agen terbukti diwarnai oleh asimetri informasi yang paling kentara pada dimensi transparansi pelaporan publik. Temuan ini memperkuat argumen Jensen dan Meckling (1976) bahwa mekanisme pengawasan yang kuat diperlukan untuk memastikan agen bertindak sesuai kepentingan prinsipal.

Penelitian ini juga berkontribusi pada literatur *good village governance* dengan menunjukkan bahwa pengawasan internal berbasis kelembagaan dalam hal ini BPN dapat berfungsi sebagai pelengkap yang efektif bagi mekanisme pengawasan eksternal dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

1.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan temuan.

1. Cakupan geografis penelitian terbatas pada 10 nagari di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi untuk seluruh nagari di Kabupaten Agam atau desa-desa di daerah lain.
2. Penelitian ini tidak mengukur dampak akhir (*outcome*) dari pengelolaan keuangan nagari terhadap kesejahteraan masyarakat secara langsung. Analisis terbatas pada kualitas proses *governance*.
3. Penelitian ini tidak menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang secara kausal mempengaruhi kualitas *governance*, seperti kompetensi aparat desa, sistem informasi keuangan yang digunakan, maupun kapasitas kelembagaan BPN. Analisis terbatas pada deskripsi kualitas proses *governance* berdasarkan persepsi responden.

1.4 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran disampaikan kepada pihak-pihak relevan.

1. penelitian berikutnya memperluas wilayah kajian ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Agam, atau bahkan mencakup kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat yang juga menerapkan sistem pemerintahan nagari. Perluasan cakupan geografis tersebut diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih representatif dan dapat digeneralisasi secara lebih luas.
2. penelitian selanjutnya mengintegrasikan pengukuran outcome pengelolaan keuangan nagari, seperti tingkat kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan, peningkatan akses layanan publik, maupun indikator pembangunan manusia di tingkat nagari. Pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas pengelolaan keuangan nagari secara menyeluruh, tidak hanya dari sudut pandang proses tetapi juga dari sudut pandang hasil yang dicapai.
3. Penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel kompetensi aparat desa sebagai variabel independen untuk menguji pengaruhnya secara empiris terhadap kualitas governance pengelolaan keuangan nagari, serta memperluas cakupan responden dengan melibatkan masyarakat sebagai penilai eksternal lainnya untuk mengurangi potensi self-assessment bias.